



Analisis Pengaruh Regulasi Pemerintah Terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan

Amelia Nur Maharani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ersi Sisdianto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan letnan kolonel H Jl. Endro suratmin, Sukarama, kecamatan Sukarama,
kota Bandar Lampung, Lampung. 35131

Korespondensi penulis: amelianurmaharani@gmail.com

Abstrak. *Government regulations play a critical role in promoting the implementation of environmental accounting, particularly in the context of sustainability and corporate social responsibility. This study aims to analyze the impact of government regulations on the adoption of environmental accounting across various industrial sectors. A descriptive approach was employed to examine the relationship between regulations and environmental accounting practices, using data collected from surveys and regulatory document reviews. The findings indicate that clear and stringent regulations enhance corporate compliance with environmental reporting; however, challenges persist due to limited understanding and resource constraints in certain companies. This study highlights the importance of collaboration between governments and corporations to establish effective regulatory systems that support environmental sustainability. In conclusion, well-designed government regulations can act as a catalyst for integrating environmental accounting into business practices, significantly contributing to global sustainability goals.*

Keywords: *government regulation; environmental accounting; sustainability; social responsibility*

Abstrak. Regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penerapan akuntansi lingkungan, khususnya dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi pemerintah terhadap penerapan akuntansi lingkungan di berbagai sektor industri. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara regulasi dan implementasi akuntansi lingkungan, dengan data yang dikumpulkan melalui survei dan studi dokumen peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan lingkungan, namun tantangan masih muncul dari kurangnya pemahaman dan keterbatasan sumber daya di beberapa perusahaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam menciptakan sistem regulasi yang efektif dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, regulasi pemerintah yang dirancang dengan baik dapat menjadi katalisator untuk integrasi akuntansi lingkungan ke dalam praktik bisnis, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan keberlanjutan global.

Kata kunci: Akuntansi Lingkungan; Keberlanjutan; Regulasi Pemerintah; Tanggung Jawab Sosial

PENDAHULUAN

Isu lingkungan global telah menjadi salah satu perhatian utama di abad ini, mengingat semakin meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan dampak aktivitas manusia yang mengancam keberlanjutan planet ini. Perubahan iklim, polusi, dan degradasi lingkungan telah mendorong pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan. Salah satu pendekatan yang mulai diadopsi adalah integrasi aspek lingkungan ke dalam kebijakan dan laporan keuangan perusahaan, yang dikenal sebagai akuntansi lingkungan (Pelu et al., 2022).

Akuntansi lingkungan tidak hanya menjadi alat untuk mencatat biaya lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, regulasi pemerintah berperan sebagai penggerak utama yang memastikan perusahaan mengadopsi standar akuntansi lingkungan yang memadai. Regulasi yang tepat dapat memberikan kerangka kerja yang jelas, mendorong kepatuhan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun demikian, pelaksanaan akuntansi lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya akuntansi lingkungan, atau kesulitan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pelaporan mereka. Selain itu, regulasi yang ada sering kali kurang spesifik, sehingga menyulitkan perusahaan dalam mengimplementasikannya secara efektif (Asni, 2018). Ditambah lagi, keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknologi maupun keahlian, menjadi kendala utama yang menghambat penerapan akuntansi lingkungan secara luas.

Dalam penerapan akuntansi lingkungan, terdapat sejumlah isu penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku masih rendah, terutama di sektor-sektor yang kurang terdampak langsung oleh tekanan publik atau investor. Kedua, terdapat kurangnya harmonisasi antara standar nasional dan internasional, yang menciptakan kebingungan bagi perusahaan multinasional. Ketiga, kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pelaporan lingkungan masih relatif rendah, sehingga insentif untuk menerapkan akuntansi lingkungan belum cukup kuat. Keempat, tantangan teknis dalam pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan sering menjadi hambatan utama, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti peran regulasi dalam mendorong penerapan akuntansi lingkungan. (Hamid & Ilham Akbar Garusu, 2024) menunjukkan bahwa regulasi yang ketat cenderung meningkatkan transparansi lingkungan di sektor industri tertentu. Di sisi lain (Susi Susanti et al., 2021) menyarankan bahwa dukungan teknis dan pelatihan bagi perusahaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi akuntansi lingkungan. Selain itu (Ramadhan & Dewi, 2024) menemukan bahwa perusahaan yang lebih aktif dalam pelaporan lingkungan menunjukkan kinerja keberlanjutan yang lebih baik, terutama jika regulasi didukung oleh insentif yang memadai.

Meskipun telah ada banyak penelitian yang membahas topik ini, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaruh langsung regulasi pemerintah terhadap penerapan akuntansi lingkungan di Indonesia. Dengan fokus pada konteks lokal, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang relevan untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi pemerintah terhadap penerapan akuntansi lingkungan di berbagai sektor industri. Penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengadopsi akuntansi lingkungan, serta mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepatuhan dan efektivitas

regulasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik, sehingga mendukung tujuan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan secara menyeluruh.

KAJIAN TEORI

A. Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah merujuk pada seperangkat aturan, kebijakan, dan undang-undang yang dirancang oleh otoritas berwenang untuk mengatur aktivitas individu, organisasi, dan perusahaan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, etika, serta kepentingan publik. Dalam konteks akuntansi lingkungan, regulasi pemerintah memainkan peran penting sebagai penggerak utama untuk mendorong perusahaan mematuhi standar pelaporan lingkungan yang telah ditetapkan (Darsani & Amelia, 2023).

Regulasi lingkungan di berbagai negara sering kali mencakup kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka, mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan mematuhi standar emisi yang telah ditentukan. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang relevan. Regulasi ini tidak hanya mengatur pengelolaan lingkungan secara umum, tetapi juga memberikan pedoman terkait penyusunan laporan yang mencakup aspek-aspek keberlanjutan.

Namun, efektivitas regulasi sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, adanya perbedaan dalam tingkat pemahaman dan interpretasi regulasi oleh berbagai pihak. Kedua, keterbatasan dalam mekanisme penegakan hukum, seperti kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas, sering kali menjadi kendala dalam implementasi regulasi. Ketiga, regulasi yang terlalu umum atau tidak spesifik dapat menyulitkan perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi lingkungan yang sesuai.

Selain itu, harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) atau International Financial Reporting Standards (IFRS), juga menjadi tantangan. Dalam era globalisasi, perusahaan multinasional sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan pelaporan mereka agar memenuhi persyaratan baik di tingkat lokal maupun global.

Untuk meningkatkan penerapan akuntansi lingkungan, regulasi pemerintah harus mencakup beberapa aspek penting. Regulasi harus spesifik, realistis, dan didukung oleh mekanisme penegakan yang efektif. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan, seperti pengurangan pajak atau pengakuan publik. Edukasi dan pelatihan juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk regulator, perusahaan, dan masyarakat, memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya akuntansi lingkungan.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat lebih termotivasi untuk mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian integral dari sistem pelaporan mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi pada upaya kolektif untuk melindungi lingkungan dan mencapai tujuan keberlanjutan global.

B. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan adalah cabang akuntansi yang bertujuan untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak aktivitas ekonomi suatu organisasi terhadap lingkungan (Pelu et al., 2022). Praktik ini mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif mengenai penggunaan sumber daya alam, emisi, limbah, serta biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Akuntansi lingkungan membantu perusahaan memahami kontribusi mereka terhadap keberlanjutan dan bertindak lebih bertanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka.

Secara umum, akuntansi lingkungan melibatkan dua komponen utama. Pertama, **akuntansi lingkungan fisik**, yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan data fisik, seperti jumlah energi yang digunakan, limbah yang dihasilkan, atau air yang dikonsumsi. Kedua, **akuntansi lingkungan moneter**, yang mencatat biaya dan manfaat ekonomi yang terkait dengan aktivitas lingkungan, seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan, biaya pengolahan limbah, atau penalti akibat pelanggaran peraturan lingkungan (Roni Setiawan et al., 2023).

Akuntansi lingkungan tidak hanya relevan bagi perusahaan, tetapi juga penting bagi para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, masyarakat, dan investor. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk:

1. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya alam.
2. Mengidentifikasi risiko lingkungan yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis.
3. Memenuhi persyaratan regulasi dan standar pelaporan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional.
4. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan melalui pelaporan yang transparan (Dinda Indri L. L. et al., 2023).

Namun, penerapan akuntansi lingkungan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan standar pelaporan lingkungan yang seragam di tingkat global. Perbedaan dalam regulasi dan kerangka pelaporan di berbagai negara dapat menyulitkan perusahaan, terutama perusahaan multinasional, untuk menyusun laporan lingkungan yang konsisten. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis, minimnya pelatihan, serta biaya tinggi yang terkait dengan pengumpulan data lingkungan menjadi hambatan lain dalam implementasi akuntansi lingkungan (Aruan, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, banyak organisasi internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB), telah mengembangkan pedoman dan standar untuk membantu perusahaan menerapkan praktik akuntansi lingkungan secara lebih efektif. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong adopsi akuntansi lingkungan melalui kebijakan insentif, regulasi yang spesifik, dan dukungan teknis bagi perusahaan (Intan & Sari, 2023).

Dengan mengintegrasikan akuntansi lingkungan ke dalam sistem pelaporan keuangan, perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk melindungi lingkungan. Selain itu, praktik ini dapat memberikan nilai tambah dalam jangka panjang, baik dari segi keberlanjutan bisnis maupun kepercayaan publik terhadap perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengaruh regulasi pemerintah terhadap penerapan akuntansi lingkungan (Nasution, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dengan narasumber yang relevan, seperti manajer lingkungan, akuntan perusahaan, regulator, serta pakar keberlanjutan. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, seperti laporan tahunan perusahaan, laporan keberlanjutan, regulasi pemerintah terkait akuntansi lingkungan, dan publikasi akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses berikut:

1. Wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan terkait implementasi akuntansi lingkungan.
2. Kajian dokumen untuk menganalisis regulasi pemerintah yang relevan, serta praktik akuntansi lingkungan di berbagai sektor industri.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara regulasi pemerintah dan penerapan akuntansi lingkungan secara mendalam. Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Reduksi data
Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data
Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel untuk mempermudah pemahaman hubungan antara variabel yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Kesimpulan sementara diuji validitasnya dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen, serta dikonfirmasi dengan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Regulasi Pemerintah dalam Akuntansi Lingkungan

Regulasi pemerintah berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur penerapan akuntansi lingkungan di berbagai sektor industri. Dalam konteks Indonesia, sejumlah undang-undang dan peraturan telah dirancang untuk mendorong perusahaan melaporkan dampak aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan (Pangayow, 2018). Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menekankan tanggung jawab setiap pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, termasuk melalui pelaporan dampak lingkungan dalam kegiatan usahanya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dapat diintegrasikan dalam laporan keuangan.
3. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS). SAK mendorong perusahaan untuk mengadopsi pelaporan keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, dalam laporan tahunan mereka .

Regulasi ini memberikan kerangka kerja bagi perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pelaporan keuangan, sekaligus memperkuat komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan. Regulasi yang tegas membantu menciptakan standar pelaporan lingkungan yang seragam, sehingga perusahaan memiliki pedoman yang jelas dalam melaporkan dampak lingkungan. Standar ini juga memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan bersifat akurat, relevan, dan dapat dibandingkan. Sebagai contoh Global Reporting Initiative (GRI) sering digunakan sebagai acuan untuk pelaporan keberlanjutan, termasuk elemen lingkun (Haris et al., 2021). Pemerintah dapat mendorong adopsi standar ini melalui regulasi. Pelaporan yang seragam memudahkan pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, dan masyarakat, untuk mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan secara objektif (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Ketekatan regulasi memiliki korelasi langsung dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan lingkungan. Regulasi yang ketat, dengan sanksi yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif, cenderung meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan (Wahyuningsih & Meiranto, 2021). Sebaliknya, regulasi yang longgar atau kurang spesifik dapat menyebabkan:

- a. Minimnya pelaporan lingkungan, karena perusahaan tidak merasa terdorong untuk melaksanakannya.
- b. Adanya kesenjangan dalam kualitas laporan lingkungan antarperusahaan.

Sebagai contoh, negara-negara dengan regulasi lingkungan yang ketat, seperti Uni Eropa, memiliki tingkat pelaporan lingkungan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya undang-undang yang mewajibkan pelaporan non-finansial, termasuk aspek keberlanjutan dan lingkungan, serta pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaannya. Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi seperti revisi terhadap UU Lingkungan Hidup dan penyempurnaan SAK berbasis keberlanjutan dapat meningkatkan efektivitas implementasi akuntansi lingkungan. Hal ini juga akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dampak lingkungan (Martania Dwi Hapsari, 2023) .

B. Implementasi Akuntansi Lingkungan di Perusahaan

Penerapan akuntansi lingkungan di perusahaan melibatkan integrasi data dan informasi terkait dampak lingkungan dalam sistem pelaporan keuangan. Mekanisme ini mencakup:

1. Identifikasi dan Pengukuran Dampak Lingkungan
Perusahaan mengidentifikasi kegiatan operasional yang berdampak pada lingkungan, seperti emisi karbon, penggunaan air, dan pengelolaan limbah. Dampak ini kemudian diukur secara kuantitatif untuk dimasukkan dalam laporan keberlanjutan.
2. Pencatatan dan Pelaporan Biaya Lingkungan
Biaya lingkungan, seperti pengelolaan limbah, konservasi energi, atau investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dicatat dalam laporan keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan.
3. Kepatuhan terhadap Standar Pelaporan
Perusahaan menggunakan kerangka pelaporan seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau standar lain yang diwajibkan pemerintah untuk menyusun laporan lingkungan.

Meskipun penting, implementasi akuntansi lingkungan sering menghadapi berbagai kendala:

- a. **Biaya Implementasi**
Banyak perusahaan, terutama skala kecil dan menengah, merasa terbebani oleh biaya yang tinggi untuk mengadopsi akuntansi lingkungan. Ini meliputi biaya pelatihan, pengadaan teknologi, dan penyusunan laporan.
- b. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**
Tidak semua perusahaan memiliki staf dengan keahlian khusus dalam akuntansi lingkungan. Keterbatasan ini dapat menghambat proses penerapan secara efektif.
- c. **Infrastruktur Pendukung**
Infrastruktur untuk mendukung pengumpulan data lingkungan, seperti alat pengukur emisi atau sistem pelaporan digital, sering kali tidak memadai, terutama di daerah dengan akses teknologi terbatas.
- d. **Kurangnya Kesadaran dan Komitmen**
Beberapa perusahaan belum menyadari pentingnya pelaporan lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan bisnis, sehingga tidak memprioritaskan penerapannya (Nugraha et al., 2023).

Contoh Penerapan Akuntansi Lingkungan oleh Perusahaan

- 1) **PT Pertamina (Persero)**
Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina menerapkan pelaporan keberlanjutan yang mencakup emisi karbon, pengelolaan limbah, dan konservasi energi. Pelaporan ini mengacu pada GRI Standards dan disesuaikan dengan regulasi lingkungan nasional.
- 2) **Unilever Indonesia**
Unilever menerapkan konsep "Sustainable Living Plan," yang mencakup pengelolaan limbah plastik dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Laporan keberlanjutannya menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.
- 3) **Freeport Indonesia**
Dalam operasional tambang, Freeport menerapkan akuntansi lingkungan dengan fokus pada pengelolaan tailing dan rehabilitasi lahan tambang, sesuai dengan peraturan lingkungan nasional dan internasional (Ramadhan & Dewi, 2024).

C. Pengaruh Regulasi Pemerintah Terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan

Penerapan akuntansi lingkungan di perusahaan sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yang ada, yang menetapkan pedoman dan kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan mereka. Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, pemerintah berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam sistem akuntansi mereka. Di Indonesia, sejumlah undang-undang terkait memberikan kerangka hukum yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang akurat mengenai dampak lingkungan (Sutrisna Sukirman & Suciati, 2019).

Regulasi pemerintah berfungsi sebagai landasan hukum yang memberi kewajiban pada perusahaan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Regulasi ini bukan hanya sekadar instruksi administratif, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar yaitu untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan, meminimalkan dampak negatif, serta memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan terkait.

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini menekankan kewajiban perusahaan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, regulasi ini berhubungan langsung dengan penerapan akuntansi lingkungan karena perusahaan diharuskan untuk memantau, mengukur, dan melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Pengelolaan lingkungan yang baik perlu didokumentasikan secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Dalam laporan keberlanjutan ini, perusahaan wajib menyajikan informasi mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas mereka. Hal ini memperkuat pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam sistem akuntansi perusahaan, mendorong mereka untuk secara eksplisit menyajikan dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya, yang akan tercermin dalam laporan tahunan (Ratulangi et al., 2018).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang

Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Terbuka, Peraturan

ini mengatur kewajiban bagi perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan yang meliputi aspek lingkungan. Dalam konteks ini, regulasi tersebut tidak hanya memotivasi perusahaan untuk menyusun laporan terkait keberlanjutan, tetapi juga untuk memasukkan informasi yang berkaitan dengan dampak lingkungan mereka. Regulasi ini juga memberikan pedoman terkait metode dan format yang harus digunakan dalam pelaporan, yang mendukung perusahaan dalam menerapkan sistem akuntansi lingkungan secara lebih terstruktur.

Mekanisme penerapan akuntansi lingkungan bervariasi antar sektor industri. Beberapa perusahaan besar di sektor industri berat atau manufaktur sudah memiliki sistem akuntansi lingkungan yang matang, yang mencakup pengukuran emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi. Sementara itu, di sektor lainnya, penerapan akuntansi lingkungan masih terbatas pada pelaporan dasar dan belum menyeluruh (Saraswati, 2024). Untuk memastikan keberhasilan penerapan akuntansi lingkungan yang efektif di perusahaan, ada beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan:

a. Regulasi yang Spesifik, Terukur, dan Memiliki Mekanisme Penegakan yang Efektif

Regulasi yang jelas, terperinci, dan mudah diukur sangat penting dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntansi lingkungan secara konsisten. Peraturan yang spesifik mengenai standar pelaporan lingkungan memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan tentang apa yang harus dilakukan dan dilaporkan. Selain itu, regulasi harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif, seperti sanksi atau insentif, yang dapat memastikan kepatuhan perusahaan. Tanpa adanya penegakan yang tegas, perusahaan mungkin kurang termotivasi untuk melaksanakan standar yang ditetapkan, meskipun mereka terikat oleh regulasi tersebut.

b. Dukungan Pemerintah melalui Pelatihan, Insentif, atau Kebijakan Pendampingan

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan teknis bagi perusahaan melalui pelatihan dan program pendampingan. Hal ini sangat penting terutama untuk perusahaan kecil dan menengah yang mungkin kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi terkait akuntansi lingkungan. Selain itu, insentif fiskal atau kebijakan pendampingan lainnya dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam penerapan akuntansi lingkungan yang baik. Dengan memberikan dukungan berupa pelatihan dan bantuan teknis, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang memadai untuk mematuhi regulasi.

c. Peningkatan Kesadaran Perusahaan terhadap Pentingnya Keberlanjutan dan Akuntabilitas

Kesadaran yang tinggi dari pihak manajemen perusahaan terhadap pentingnya keberlanjutan dan akuntabilitas sangat mendukung penerapan akuntansi lingkungan. Ketika perusahaan memahami bahwa keberlanjutan lingkungan tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang bisnis mereka, mereka lebih cenderung untuk berkomitmen dalam menerapkan akuntansi lingkungan yang tepat. Faktor budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan juga menjadi kunci dalam mendorong adopsi kebijakan ini secara efektif (Tamala Salavia et al., 2024).

Penerapan regulasi pemerintah yang mengatur akuntansi lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan baik dari sisi lingkungan maupun bisnis perusahaan. Regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan dampak lingkungan mereka dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan berkontribusi pada transparansi. Dengan adanya kewajiban ini, perusahaan diharapkan untuk tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka. Hal ini dapat mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, karena perusahaan akan merasa diawasi oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Penerapan akuntansi lingkungan yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keberlanjutan mereka, seperti pengurangan jejak karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Secara langsung, hal ini juga berdampak positif pada reputasi perusahaan, yang menjadi semakin penting di mata konsumen, investor, dan masyarakat umum. Perusahaan yang melaporkan dampak lingkungan mereka secara transparan cenderung lebih dihargai oleh para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Selain itu, investor semakin tertarik pada perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan memiliki sistem pelaporan yang baik terkait dengan dampak lingkungan.

Dalam jangka panjang, regulasi yang mendorong akuntansi lingkungan dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dengan mendorong perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan mereka secara lebih efisien, seperti pengurangan emisi dan pengelolaan limbah yang lebih baik, regulasi ini berperan dalam mengurangi kerusakan ekosistem. Hal ini juga akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan sumber daya alam, yang penting untuk kelangsungan hidup ekonomi global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, B. J. (2021). Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Pakan Ternak PT Universal Agri Bisnisindo. *Perspektif Akuntansi*, 3(3), 217–252. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p217-252>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur. *Universitas Negeri Surabaya*, 2(1), 6.
- Asni. (2018). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Dalam Materi Menulis Paragraf Berdasarkan Gambar Seri Melalui Metode Diskusi Dikelas IIIB SD. *Indonesian Journal of Basic Education*, 1(1), 1–8.
- Darsani, H., & Amelia, R. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pengolahan Limbah Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan). *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(5), 319–331. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i4.505>
- Dinda Indri L. L., Intan Sari, Riski Ilham Syah Saputra, Sonya Widia Sari, Rika Damai Yanti, & Ersi Sisdiyanto. (2023). Integrasi Akuntansi Lingkungan Untuk Kinerja Bisnis Dan Pertanggungjawaban Yang Komprehensif. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 244–254. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2370>
- Hamid, A., & Ilham Akbar Garusu. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13(1), 25–36. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i1.4376>
- Haris, T. R., Junaid, A., Pelu, M. F. A. R., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Strategi Organisasi Terhadap Kinerja Lingkungan dan Inovasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar). *Center of Economic Students Journal*, 4(4), 358–382. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i4.462>
- Intan, P., & Sari, P. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Usaha Gula Merah Abadi Kecamatan Sumbergempol. *Jurnal Mahasiswa Akuntans*, 2(2), 233–242.
- Martania Dwi Hapsari. (2023). Analisis Penerapan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi* 45, 4(1), 65–72. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.724>
- Nasution. (2015). *Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Jakarta : Erlangga.
- Nugraha, S., Andayani, D., & Tumanggor, M. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Unes Law Review*, 6(2), 4896–4909.
- Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Tanggungjawab Lingkungan, Legitimasi, Dan Peluang. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Volume*, 1(1), 56–70.
- Pelu, M. F. A., Tenriwaru, Saira, G. M., & Muslim. (2022). Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Intervening. *Seiko: Journal of Management & Business*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1401>
- Ramadhan, M. A., & Dewi, R. R. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Biaya Modal. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 1140–1154. <https://doi.org/10.37481/jmkeb.v4i3.880>
- Ratulangi, A. V. J., Pangemanan, S., & Tirayoh, V. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi

- Lingkungan Terhadap Biaya Operasional Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 410–418. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20292.2018>
- Roni Setiawan, Raihan Aditya Perkasa, & Zacky Maulana. (2023). Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Hal Pengelolaan Limbah Produksi Pada Perusahaan Pengalengan Ikan Tuna PT. Aneka Tuna Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 95–102. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1329>
- Saraswati, A. A. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Pada Puskesmas Kubutambahan I. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(2), 179–189.
- Susi Susanti, Baehaqi, A., & Firman, M. A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 91–111. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i2.223>
- Sutrisna Sukirman, A., & Suciati. (2019). Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada RSUP DR. Wahyudin Sudirohusono Makasar. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3, 89–105.
- Tamala Salavia, Putri Seftiana Fitri, & Dien Noviany Rahmatika. (2024). Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Perusahaan: Systematic Literature Review. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 108–122. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.281>
- Wahyuningsih, I., & Meiranto, W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–12.